



Peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital

Firmanda Taufiq¹, Ayu Maulida Alkholid²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
email: firmandataufiq@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
email: ayumaulidaalkholid@gmail.com

Abstract

Religious moderation is an important key in the religious diversity landscape. This concept is one of the alternatives and solutions amid various conflicts and problems in the name of the division in the name of religion, especially in Indonesia. These problems must be responded to and find solutions so that religious problems in Indonesia can be unraveled. Especially during the digital era like today, promoting and actualizing religious moderation in the context of religion in Indonesia is an absolute must. This study seeks to explore and examine the role of the Ministry of Religion as one of the government institutions that functions as a policymaker in religious activities, especially in the issue of implementing religious moderation in Indonesia, especially in the context of the current digital era. This study uses a descriptive-analytical approach by taking some data and references sourced from several journal articles, books, and the Ministry of Religion website, as well as various kinds of literature that support the topic in the discussion of this research. Researchers found that the Ministry of Religion seeks to encourage religious moderation in its policies and programs, especially in dealing with religious conflicts in Indonesia, especially conflicts between religious believers, strengthening radicalism, and the emergence of transnational religious ideas that have begun to develop and enter Indonesia, as well as spreading understanding in a structured and massive manner. This is done to muffle and reduce the occurrence of various acts and acts of radicalism and extremism in Indonesia.

Keywords: Digital era, Ministry of Religious Affairs, religious moderation.

Abstrak

Moderasi beragama merupakan kunci penting dalam lanskap keragaman agama. Konsep ini menjadi salah satu alternatif dan solusi di tengah berbagai konflik dan permasalahan yang mengatasnamakan pemecahbelahan atas nama agama, khususnya di Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut harus direspon dan dicarikan solusi agar permasalahan keagamaan di Indonesia dapat terurai. Apalagi di tengah era digital seperti sekarang ini, menggalakkan dan mengaktualisasikan moderasi beragama dalam konteks beragama di Indonesia menjadi hal yang mutlak. Kajian ini berupaya menelusuri dan mengkaji peran Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan dalam kegiatan keagamaan, terutama dalam persoalan implementasi moderasi beragama di Indonesia, terutama dalam konteks era digital saat ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-analisis dengan mengambil beberapa data dan referensi yang bersumber dari beberapa artikel jurnal, buku, dan website Kementerian Agama, serta berbagai literatur yang mendukung topik dalam pembahasan penelitian ini. Peneliti menemukan bahwa Kementerian Agama berupaya untuk mendorong moderasi beragama dalam kebijakan dan programnya, terutama dalam menangani konflik agama di Indonesia, khususnya konflik antarumat beragama, menguatnya paham radikalisme, dan munculnya ide-ide keagamaan transnasional yang sudah mulai berkembang dan masuk ke Indonesia, serta menyebarkan pemahamannya secara terstruktur dan masif. Hal ini dilakukan untuk meredam dan mengurangi terjadinya berbagai aksi dan tindakan radikalisme dan ekstremisme di Indonesia.

Kata kunci: Era digital, Kementerian Agama, moderasi beragama.

1. PENDAHULUAN

Di tengah keragaman etnis, ras, budaya, dan agama, Indonesia masih rentan dengan persoalan konflik. Tindak terorisme dan radikalisme masih menjadi persoalan besar bagi bangsa ini. Hal ini pula yang memunculkan upaya untuk melakukan moderasi dalam beragama. Kondisi ini pula yang membuat pemerintah, yakni melalui Kementerian Agama mempromosikan dan menggalakkan moderasi beragama. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi adanya ekstremisme, tindak radikalisme, dan konflik agama yang tidak dapat dihindarkan dalam lanskap kebhinekaan. Untuk itu, perlu adanya praktik dalam melakukan moderasi beragama di tengah berbagai kompleksitas permasalahan di masyarakat.

Moderasi beragama merupakan kunci penting dalam meminimalisir adanya tindak radikal dan ekstremisme dalam beragama di Indonesia. Kementerian Agama menjadi elemen penting dalam bertanggungjawab atas kerukunan umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, usaha dalam mendorong moderasi beragama harus dijalankan dalam menghadapi ideologi radikalisme yang melanda negeri ini (Irama & Zamzami, 2021). Program penguatan moderasi beragama juga digencarkan pada tahun 2019 oleh Kementerian Agama. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang diselenggarakan pada 23-25 Januari 2019 di Jakarta dan Menteri Agama yang menjabat yakni Lukman Hakim Saifuddin memberikan pidato yang bertajuk "Moderasi untuk Kebersamaan Umat: Memaknai Rapat Kerja Nasional Kemenag 2019". Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan berbagai materi yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh semua pimpinan di bawah naungan Kementerian Agama. Tiga hal yang disampaikan, yakni moderasi beragama, kebersamaan umat, dan integrasi data. Ia berharap agar konsep moderasi beragama mampu diaplikasikan dalam semua program Kementerian Agama.

Moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan pemahaman beragama yang moderat dan proporsional. Sementara itu, di Indonesia memiliki dua organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan terbesar dan memiliki pemahaman yang moderat, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua ormas tersebut telah mengejawantahkan moderasi beragama yang baik selama organisasi tersebut didirikan hingga sampai saat ini. NU dan Muhammadiyah berkontribusi besar dalam mengaplikasikan sikap moderat dan terus menebar kemanfaatan untuk umat.

Selanjutnya, berbagai penelitian tentang moderasi beragama juga telah dilakukan oleh beberapa sarjana dan peneliti, diantaranya yakni Mohammad Ahyan Yusuf Sya'bani yang meneliti moderasi beragama dalam integrasi nilai-nilai pendidikan Islam wasathiyah dalam meningkatkan kerukunan dan toleransi umat beragama di Kebomas Gresik (Sya'bani, dkk., 2020). Di dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa program pengabdian yang dilakukan oleh organisasi Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) ditujukan terbangunnya perilaku budaya moderasi beragama dan islam wasathiyah melalui pendidikan, terutama dalam meningkatkan kerukunan dan toleransi umat beragama. Selain itu, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Edy Sutrisno yakni mengenai aktualisasi moderasi beragama di lembaga pendidikan. Penelitian ini mengulas bagaimana kontribusi pendidikan dalam mempromosikan konsep moderasi beragama, terutama bagi masyarakat Indonesia yang multikultural (Sutrisno, 2019).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Yoga Irama dan Mukhammad Zamzami yang mengkaji terkait formula dalam pengarusutamaan moderasi beragama Kementerian Agama pada tahun 2019-2020 (Irama & Zamzami, 2021). Penelitian ini menemukan bahwa formula moderasi beragama yang dipromosikan oleh Kementerian Agama adalah strategi yang diupayakan dari berbagai lini, seperti halnya usaha menguatkan pemahaman agama yang moderat di tengah heterogenitas masyarakat Indonesia, penguatan moderasi beragama melalui program bimbingan pra-nikah dan pelatihan kaderisasi bagi para instruktur moderasi beragama yang diperuntukkan bagi para pendakwah, mahasiswa, dosen, dan berbagai tokoh agama yang membantu terselenggaranya kebijakan moderasi beragama tersebut.

Dari beberapa studi terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian sebelumnya masih sebatas pada sisi formalitas semata. Artinya, masih belum menyentuh sisi implementatif dan praksisnya. Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis akan mengulas bagaimana konsep moderasi beragama yang dipromosikan oleh Kementerian Agama mampu berkontribusi dalam mengurai dan meminimalisir adanya konflik atas nama agama dan hal-hal terkait counter atas terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Selain itu, berbagai usaha dan strategi Kementerian Agama dalam mengimplementasikan moderasi beragama juga menjadi fokus penting dalam melihat bagaimana upaya moderasi beragama yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama juga mampu diimplementasikan di berbagai sektor, terutama di bawah naungan Kementerian Agama yang bertujuan dalam menguatkan kerukunan antar umat beragama. Sementara penelitian ini akan mengkaji dan melacak bagaimana peran dan strategi pemerintah melalui Kementerian Agama dalam menggalakkan dan mempromosikan moderasi beragama, serta mengimplementasikannya ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. METODE

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis dengan mengulas berbagai literatur dan data-data yang didapat dari beberapa artikel jurnal, buku-buku, dan pernyataan Menteri Agama, serta website Kementerian Agama yang memuat mengenai moderasi beragama, baik dalam tataran gagasan maupun praksis. Selanjutnya, dari data-data yang didapat tersebut dipilah sesuai dengan topik pembahasan dan akhirnya dianalisis sesuai dengan pembahasan yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN DISKUSI

Moderasi diambil dari bahasa latin, yakni moderatio yang memiliki arti kesedangan (tidak lebih dan tidak kurang). Kata tersebut juga bermakna pengendalian diri atas sikap berlebih dan kekurangan. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran atas sikap ekstrem. Dari beberapa arti mengenai kata moderasi tersebut, dapat dikatakan bahwa moderasi adalah sikap keseimbangan dalam berbagai dimensi, baik moral, karakter, dan keyakinan, baik dalam skala mikro maupun makro.

Sementara itu, untuk menentukan bahwa paham dan perilaku beragama seseorang, maka diperlukan ukuran dan batasan. Hal ini dilakukan untuk menilai dan memetakan apakah seseorang moderat ataupun ekstrem. Dalam persoalan ini, maka perlu adanya upaya pelacakan atas sumber-sumber yang akurat, terutama teks-teks agama, konstitusi negara, dan konsensus secara bersamaan. Konsep moderasi beragama juga harus mengacu pada sikap beragama yang bersifat seimbang dan tidak berlebihan dalam mengamalkan ibadah, serta memberikan penghormatan ataupun bersikap toleran atas praktik ibadah yang dilakukan oleh pemeluk agama lain.

Menyikapi persoalan di atas, moderasi beragama menjadi penting sebagai alternatif dan solusi di tengah berbagai paham keagamaan yang menyimpang dan banyak bermunculannya kelompok ekstrim dan radikal. Maka, moderasi beragama merupakan upaya dalam menciptakan terjadinya keseimbangan dan kerukunan umat di dunia. Selain itu, dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, maka moderasi beragama adalah suatu keniscayaan dalam membangun sikap moderat dan terciptanya kedamaian dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama.

Sedangkan dalam konteks praksis, aplikasi dari konsep moderat, yakni ada empat cakupan, yaitu moderat dalam aspek akidah, moderat dalam aspek ibadah, moderat dalam aspek akhlak, dan moderat dalam aspek syari'at. Dari berbagai cakupan tersebut, moderat dalam konteks akidah berarti ajaran Islam harus sesuai dengan fitrah manusia, berada di tengah diantara mereka yang percaya pada khurafat dan mitos. Sedangkan dalam konteks ibadah, Islam sesungguhnya telah mewajibkan para penganutnya untuk melakukan dalam bentuk dan jumlah yang terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa keseimbangan dan berada di posisi tengah merupakan tugas sebagai manusia, yakni diturunkan ke muka bumi dengan mengemban amanah "khalifah fi al-ard" dan hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah.

Sementara moderat dalam aspek akhlak, Islam telah mengakui terkait unsur jasad dan ruh yang ada dalam manusia. Tidak hanya itu, unsur ruh menjadi lambang sempurnanya manusia, yakni akal dan nafsu. Sedangkan moderat dalam aspek syari'at, yaitu menyeimbangkan dalam penentuan hukum-hukum dalam Islam. Jika dikaitkan

dengan konteks Indonesia, moderasi dapat dikategorikan kedalam tiga prinsip, yakni moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. Dalam prinsip yang pertama, moderasi dalam pemikiran yaitu kemampuan dalam mengkolaborasikan antara teks dan konteks. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman keagamaan yang kompleks dan dinamis. Selain itu, situasi ini juga akan menghasilkan muslim yang moderat dan memahami secara tekstual serta kontekstual.

Prinsip kedua, yakni moderasi dalam gerakan, dimana aktivitas dakwah yang memiliki tujuan dalam mengajak kepada kebaikan dan menjauhi hal mungkar. Hal itu tidak harus bersifat memaksa dan memakai upaya kekerasan dalam aktivitasnya. Selain itu, dalam moderasi ini juga menggunakan pendekatan yang ramah dan santun dalam membangun perdamaian dan kasih sayang dalam kehidupan. Sementara, prinsip ketiga yakni moderasi dalam praktik, yakni penguatan pada hubungan agama dan tradisi yang telah berkembang di masyarakat setempat. Agama dapat menjadi ruh dalam kehidupan dan lentur pada budaya. Artinya, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagai seorang Muslim yang moderat mampu berdialog dan tidak anti kepada budaya dan tidak bertentangan dengan syariat agama.

Dari beberapa prinsip tersebut, pada dasarnya moderasi beragama menjadi ruh dalam gerakan transmisi moderat kepada masyarakat secara luas. Dalam hal ini, Kementerian Agama menjadi bagian penting dalam mentransmisikan program moderasi beragama kepada masyarakat, terutama di wilayah Kementerian Agama. Selain itu, program moderasi beragama juga dapat diterjemahkan ke dalam program-program yang massif dan terstruktur. Sehingga, kebijakan ini dapat dikontrol sesuai dengan perkembangan dan output dari implementasi kebijakan tersebut.

3.1 Peran dan Strategi Moderasi Beragama Kementerian Agama

Upaya promosi moderasi beragama menjadi fokus utama dalam kebijakan Kementerian Agama. Berbagai strategi dilakukan secara rasional dan sistematis agar sikap dan perilaku beragama yang moderat mampu menjadi karakter dan ruh dalam berbangsa dan bernegara. Sementara itu, wacana moderat juga telah lama dan menjadi implementasi bersama, meski hanya dalam lingkup individual, tetapi hal tersebut sebagai landasan awal dalam mengimplementasikan moderasi beragama dalam lanskap yang lebih luas. Kementerian Agama memberlakukan kebijakan dalam menanamkan nilai-nilai luhur dalam berbagai program pembinaan keluarga, yakni dari penyuluhan, pembimbingan di Kantor Kementerian Agama hingga tingkat layanan Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan.

Berbagai upaya yang dilakukan tersebut untuk mengantisipasi dan meminimalisir adanya konflik agama, radikalisme dan ekstremisme yang semakin menguat. Kementerian Agama juga konsisten dalam usaha merawat moderasi di tengah masyarakat. Bahkan, Kementerian Agama juga menyelenggarakan pelatihan kader Mubaligh tingkat nasional pada tahun 2019 dan acara tersebut berisi tentang program pelatihan dalam memberikan pemahaman keagamaan yang moderat. Hal tersebut dilakukan untuk mencetak para pendakwah yang mampu mengimplementasikan nilai persatuan dan kesatuan. Tidak hanya itu, Kementerian Agama juga mengadakan Pendidikan Instruktur Nasional Moderasi Beragama (PIN-MB) yang telah diikuti sebanyak 160 orang, yakni 60 orang dosen dan 100 orang mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia (PTKI). Tujuan dari kegiatan tersebut dilakukan yakni sebagai upaya mempersiapkan instruktur moderasi beragama dalam skala yang lebih besar dan mampu menebar paham keagamaan yang moderat, terutama di lingkungan perguruan tinggi.

Strategi Kementerian Agama dalam mengimplementasikan moderasi beragama juga dilakukan dengan adanya surat edaran untuk mendirikan rumah moderasi beragama di setiap universitas. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/01/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 Tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama merupakan sebuah upaya dalam membentengi adanya paham radikal yang massif. Hal ini menjadi bukti bahwa Kementerian Agama fokus dan konsisten dalam mengaplikasikan moderasi beragama di berbagai sektor, terutama di lingkungan perguruan tinggi Islam (Kementerian Agama, 2019).

Kementerian Agama juga memiliki strategi dalam menguatkan moderasi beragama di beberapa Perguruan Tinggi, terutama di wilayah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), yakni perlu dilakukannya penyelenggaraan Ma'had Al-Jami'ah di lingkungan PTKI. Selanjutnya, penguatan keagamaan pada dosen-dosen pengampu matakuliah umum yang tidak ada latar belakang pendidikan agama Islam, perlu adanya program dalam penguatan keislaman, dan program kesinambungan yang mendukung moderasi beragama di lingkup PTKI. Tidak hanya itu, penguatan pada kajian Islam yang mengarah terhadap usaha tafaqquh fi ad-diin sebagai core-business di PTKI adalah hal penting. Lebih lanjut, penguatan terkait metodologi studi Islam juga harus diupayakan dalam melakukan reformulasi kurikulum di beberapa kampus PTKI, yang bertujuan dalam menguatkan kembali matakuliah, seperti tasawuf, sejarah peradaban Islam, dan upaya dalam pembaharuan di dalam diskursus Islam.

Tidak hanya itu, pengarusutamaan moderasi beragama di ruang digital di perguruan tinggi menjadi penting untuk digalakkan. Perguruan tinggi keagamaan Islam menjadi salah satu aktor di balik penguatan moderasi beragama (Hefni, 2020). Melalui ruang digital sebagai usaha dalam menyeimbangkan banyaknya arus informasi di media sosial. Dalam hal ini, narasi penyeimbang menjadi penting dalam melahirkan framing beragama yang substantif dan esensial, yakni moderat dan toleran. Apalagi di tengah era digital dengan bermacam-macam informasi yang didapat, seharusnya dapat di-counter melalui narasi yang meneduhkan dan menyeimbangkan paham keagamaan yang cenderung kaku dan rigid.

Selain itu, cara dan upaya yang dilakukan Kementerian Agama dengan menguatkan moderasi beragama melalui kebijakan dengan mewajibkan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para militer untuk mengimplementasikan sikap moderasi beragama dalam keseharian mereka, sehingga mereka memiliki pandangan keagamaan yang moderat dan menebar kedamaian, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir adanya tindakan ekstremisme dan radikalisme. Harapan besar melalui implementasi moderasi beragama mampu mengatasi problematika yang terjadi, terutama menyangkut kepentingan rakyat banyak. Di tengah kerentanan konflik di negeri ini, persoalan tersebut menjadi fokus pemerintah, yang dalam hal ini diinisiasi oleh Kementerian Agama yang membawahi urusan keagamaan di Indonesia.

Menteri Agama periode 2014-2019 menyatakan bahwa Kementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir telah berupaya menggalakkan penguatan moderasi beragama. Menurutnya ada tiga kecenderungan yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, yakni praktek beragama yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi, seharusnya agama hadir dalam rangka untuk memanusiakan manusia. Maka, perlu adanya upaya serius dalam merespon dan mengatasi persoalan tersebut agar hal tersebut tidak terjadi dalam keberagaman dalam beragama

(Khoeron, (Ed.), 2021). Selanjutnya, munculnya tafsir agama yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pengetahuan. Sehingga, muncul sikap dan tindakan yang mengklaim bahwa mereka paling benar, sementara yang lain salah dan berpotensi menyesatkan. Untuk itu, perlu sanad keilmuan yang jelas dan menjadi kunci ketersambungan keilmuan yang didapat, terutama dari kiai dan guru yang memiliki keilmuan mumpuni dan dapat membawa kepada kebaikan. Tidak hanya itu, cara beragama yang merusak ikatan kebangsaan dan berupaya mempolitisir agama, serta bersikap majoritarianism, dimana merasa dirinya mampu dan berhak semena-mena kepada kelompok minoritas.

Lebih lanjut, pendidikan Islam seharusnya menjadi garda depan dalam menyuarakan dan mempraktikkan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Indonesia sebagai negara majemuk memiliki modal sosial dalam rangka penguatan moderasi beragama, yakni diantaranya keberagaman dan keberagamaan. Berbagai etnis, ras, suku, budaya, dan agama membuat Indonesia patut menjadi teladan bagi dunia, apalagi masyarakat Indonesia mayoritas penganutnya Muslim.

Sementara pada masa Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas, implementasi program penguatan moderasi beragama harus dijalankan. Moderasi beragama juga telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024 (Andrios, 2021). Upaya dalam publikasi konten moderasi beragama, terutama di media sosial. Tidak hanya itu, peta jalan moderasi beragama juga sudah diselesaikan dalam upaya mengeksekusi moderasi beragama untuk diimplementasikan. Menteri Agama juga memberikan arahan dalam kegiatan Bimtek Penguatan Agen Moderasi Beragama, yang bertema "Implementasi Moderasi Beragama Menuju Indonesia Toleran" (Efendi, 2021). Menurutnya, moderasi beragama menjadi prioritas dan menentukan wajah masa depan Indonesia kedepan. Ia juga berpesan untuk para pejabat fungsional mampu menerjemahkan moderasi beragama dengan baik dan terukur. Dari pesan dan arahan tersebut, artinya kebijakan moderasi beragama tidak hanya sebuah ide dan gagasan semata, tetapi harus serius diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut, Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas menyatakan bahwa perlu adanya strategi kebudayaan dalam memperkuat moderasi beragama. Seperti halnya diselenggarakannya Festival Seni Ramadan yang dilaksanakan atas Kerjasama antara Makara Art Center Universitas Indonesia dan Kementerian Agama di Depok pada tanggal 27 April 2021. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu upaya dalam membangun gerakan kebudayaan dan menghidupkan hati melalui seni budaya agar manusia mampu memiliki kepekaan batin pada sesama manusia (Murtado, 2021).

Dari beberapa strategi dan cara yang dilakukan oleh Kementerian Agama tersebut, maka harapan besar moderasi beragama mampu diaplikasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik atas nama agama dan antar umat beragama seharusnya dapat diredam, serta mampu menjadi teladan bagi masyarakat luas, bahwa moderasi beragama adalah kunci di balik persoalan bangsa yang ditimpa dengan berbagai konflik dan paham keagamaan ekstrim dan radikal yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, adil, dan sejahtera.

Indonesia juga telah mengajak negara-negara Islam agar mampu bergerak bersama dalam mempromosikan moderasi beragama. Kesalahpahaman atas konsep dasar keislaman menjadi salah satu faktor kemunculan ekstremisme dan terorisme. Ideologi dan pemikiran garis keras yang akhirnya menyebar ke dalam berbagai literatur dan media juga menjadi salah satu problem yang harus di-counter. Maka dari itu, para negara Islam harus

bersama-sama saling mendukung dan membantu dalam membentengi generasi muda agar tidak terjerumus pada pemikiran radikal dan ekstrim (Thobib, 2018). Melalui berbagai program dalam pendidikan agama dan keagamaan, terutama dalam hal ini pemerintah dan beberapa ormas Islam berupaya memperkuat moderasi Islam sebagai sebuah manhaj keberagamaan. Apalagi Islam Indonesia memiliki sikap tawasuth dan wasathiyah yang mampu berasimilasi dengan budaya lokal yang heterogen.

3.2 Moderasi Beragama: Alternatif dalam Menghadapi Radikalisme dan Ekstremisme

Moderasi beragama menjadi salah satu alternatif dan terobosan dalam menghadapi berbagai sikap intoleransi dan konflik di tengah masyarakat. Tindak ekstremisme dan radikalisme yang menguat di akhir-akhir ini menjadi persoalan yang mesti dihadapi oleh pemerintah sebagai pemegang kendali keputusan dalam menjawab permasalahan tersebut. Hal ini pun harus direspon dan di atasi bersama. Bahkan, hampir semua agama juga dihadapkan pada persoalan tentang sisi moderasi beragama. Di lain pihak, menurunnya kualitas hubungan antar umat beragama juga mesti dicari titik temu untuk meminimalisir terjadinya konflik yang berkepanjangan. Maka, upaya penguatan moderasi beragama menjadi penting diaplikasikan untuk menangani berbagai permasalahan keagamaan yang terjadi tersebut.

Di tengah kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang heterogen. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak mudah membangun kesadaran dalam lingkup masyarakat yang majemuk. Sikap moderat dalam beragama menjadi fokus penting dalam membangun jembatan antar manusia satu sama lain dan memupuk sikap toleransi yang berlandaskan pada slogan yang menjadi penguat dan pemersatu rasa persatuan sebagai rakyat Indonesia dengan “bhinneka Tunggal Ika”, yang berarti meskipun kita berbeda-beda, tetapi harus satu. Meski berbeda ras, etnik, budaya, dan agama, tetapi seharusnya mampu menemukan titik temu diantara perbedaan tersebut untuk membangun persatuan dan kesatuan.

Implementasi konsep moderasi beragama yang dilakukan oleh Kementerian Agama menjadi strategi penting dalam upaya menghadapi persoalan terkait ekstremisme dan radikalisme di Indonesia. Moderasi beragama bukan lagi hanya suatu program semata, tetapi dapat diaplikasikan sesuai dengan kerangka dan aturan yang telah ditetapkan. Sehingga, gerakan moderasi beragama menjadi alternatif dan solusi dalam menjawab problematika tersebut. Semua elemen masyarakat harus berkontribusi dan mempromosikan, serta mengimplementasikan sikap moderat dalam beragama. Maka, dampak dari moderasi beragama nantinya mampu dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam persoalan terorisme dan konflik yang mengatasnamakan agama di Indonesia.

Tidak hanya itu, moderasi beragama juga menjadi suatu muatan nilai dan praktik yang sesuai untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Menebar sikap moderat, lembut, dan berimbang merupakan hal penting dalam membangun perdamaian dan keragaman di Indonesia. Selain itu, sebagai warga negara tentu harus membangun nilai-nilai luhur dalam mencapai persatuan dan kesatuan. Jika semua itu mampu diimplementasikan dengan baik, maka kehidupan dalam skala lebih luas dapat berjalan dengan baik, tanpa ada benturan konflik dan peristiwa yang mengarah pada tindak radikal dan ekstrem.

Kementerian Agama melakukan berbagai implementasi di berbagai sektor, terutama dalam level negara. Konsep moderasi beragama pun menjadi kebijakan jangka panjang dalam program yang telah disusun oleh Kementerian Agama tersebut. Moderasi

beragama dalam pandangan Kementerian Agama dimaksudkan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Aspek agama menjadi salah satu indikator dalam membangun sikap moderat, terlebih didalamnya memuat nilai-nilai luhur dan kebaikan. Maka, agama menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan berbangsa dan beragama (Kemenag RI, 2019).

Selain itu, dengan menguatkan pemahaman dan implementasi moderasi beragama dapat dijadikan sebagai upaya Indonesia untuk memberikan teladan dan inspirasi bagi kehidupan beragama dalam lingkup global. Hal ini tentu harus menjadi kewajiban untuk mencapai pengamalan ajaran agama yang moderat dan menebarkan kedamaian, sehingga hal tersebut juga menjadi sumbangsih Indonesia dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia. Konsep moderasi beragama juga tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga berlaku bagi pemeluk agama lain. Artinya, semua agama juga berkewajiban dalam mendorong solusi atas tindak ekstremisme beragama yang menjadi persoalan bersama diantara umat beragama.

Untuk dapat mengimplementasikan berbagai strategi yang telah disebutkan di atas, maka Kementerian Agama harus saling bersinergi dengan sektor lainnya untuk mensukseskan program penguatan moderasi beragama. Kementerian Agama juga menjadi leading sector dalam usaha mempromosikan moderasi beragama. Kementerian Agama berupaya menciptakan pembangunan sumber daya manusia yang mampu menginternalisasi nilai-nilai agama yang moderat, inklusif, toleran, dan menghargai berbagai macam perbedaan. Untuk itu, tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Kementerian Agama tidak mudah, berbagai tantangan dan faktor dalam mengupayakan dalam terwujudnya internalisasi sikap moderat dan toleran dalam beragama di Indonesia.

Dalam menyikapi berbagai persoalan atas isu moderasi beragama, Kementerian Agama juga menerbitkan beberapa kebijakan terkait merespon dan menyikapi permasalahan tersebut. Seperti halnya SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979 terkait dengan Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, yakni pada tanggal 2 Januari 1979. Selain itu, juga memberikan perlindungan atas agama yakni telah dikeluarkan dalam Penetapan Presiden RI No. 1 tahun 1965 mengenai Pencegahan dan/atau Penodaan Agama, dan KUHP pasal 156a yang menetapkan adanya hukuman pidana bagi mereka yang melakukan tindak penistaan agama (Kementerian Agama, 2019). Selanjutnya, dalam merespon dan menyikapi dengan maraknya konflik dalam pendirian rumah ibadah, pemerintah pun menerbitkan PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 mengenai Tugas Kepala Daerah dalam upaya membangun kerukunan umat beragama, pemberdayaan bagi Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Dari berbagai kebijakan keagamaan yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya tidak sepenuhnya mampu meningkatkan sikap moderat dan menghindarkan dari berbagai konflik. Akan tetapi, kebijakan tersebut diharapkan mampu meredam dan meminimalisir gesekan konflik antar kelompok masyarakat dan antar umat beragama di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kementerian Agama pada masa kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin juga berupaya untuk melakukan promosi moderasi beragama dengan berbagai strategi dan kebijakan yang ia keluarkan, seperti halnya sosialisasi dan diseminasi, pelembagaan moderasi beragama dalam berbagai program yang bersifat mengikat, dan integrasi moderasi beragama yang telah termanifestasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Usaha dalam melakukan sosialisasi moderasi beragama menjadi fokus Kementerian Agama. Hal ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat Indonesia memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku dalam beragama dengan karakter moderat. Dalam hal ini, buku *Aspiring for the Middle Path: Religious Harmony in Indonesia* (1997) yang ditulis oleh Tarmizi Taher. Buku tersebut merupakan kumpulan teks pidato Tarmizi Taher selama menjabat Menteri Agama (1993-1998). Beberapa pidato tersebut setidaknya ada empat tema besar yang ada didalamnya, diantaranya yakni hubungan Pancasila dan agama, posisi dan peran Muslim Indonesia dalam skala global, dan konsep Muslim sebagai umat di jalan tengah, serta bagaimana pandangan Islam mengenai persoalan sains dan teknologi.

Dari buku tersebut akhirnya gagasan moderasi beragama menjadi salah satu tema yang diangkat. Sementara hanya menyangkut konteks Islam. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Suryadharma Ali masih belum ada usaha dalam penguatan di level nasional dan bersifat parsial dalam lingkup sebagai usaha membangun harmoni dan kerukunan diantara umat beragama. Sementara pada masa Lukman Hakim Saifuddin, konsep moderasi beragama menjadi visi utama dalam lanskap nasional dan menjadi salah satu program utama Kementerian Agama.

Jika melihat bagaimana moderasi beragama diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, pada dasarnya membangun sikap moderat dan menguatkan sisi kemanusiaan dalam aplikasinya. Pada masa kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin, visi moderasi beragama menjadi kebijakan yang tidak hanya sekadar sebagai suatu gagasan semata, tetapi mampu diterjemahkan dalam berbagai program. Dialog yang intens antar elemen, seperti halnya agamawan, budayawan, akademisi dan masyarakat juga dilakukan untuk mendorong dan mempromosikan moderasi beragama.

Kementerian Agama juga menyelenggarakan sarasehan agamawan dan budayawan di Yogyakarta pada November 2018 yang berisi tentang pembahasan mengenai moderasi pengembangan agama dan budaya. Hingga pertemuan tersebut melahirkan "Pemufakatan Yogyakarta". Di dalam hasilnya berisikan upaya dalam menyerukan untuk mengintegrasikan antara berbangsa dan bernegara, terutama mengenai persoalan antara agama dan budaya tidak perlu dipertentangkan. Budaya dan agama seharusnya dapat saling mengisi satu sama lain, tanpa membenturkan keduanya sehingga terjadi konflik.

Selanjutnya, dalam usaha menguatkan harmoni dan kerukunan antar umat beragama, Kementerian Agama menggelar dialog antar iman dan antar generasi di Jakarta. Beberapa agamawan, budayawan, akademisi, dan masyarakat pun hadir dalam acara tersebut. Dari pertemuan tersebut akhirnya terbentuk dokumen "Risalah Jakarta tentang Kehidupan Beragama di Indonesia". Dokumen tersebut memuat pentingnya usaha dalam penguatan moderasi beragama. Dalam kehidupan beragama di konteks kontemporer juga terlihat bagaimana fenomena adanya kurangnya pengetahuan yang merupakan implikasi dari upaya indoktrinasi dan informasi serta bahan bacaan yang instan didapatkan dari media sosial, tanpa melihat bagaimana ketersambungan ilmu pengetahuan tersebut. Dampaknya, sikap konservatif dalam beragama pun muncul. Hingga akhirnya sikap tersebut melahirkan ekstremisme dan radikalisme yang menjadi persoalan serius di Indonesia.

Kajian yang dilakukan oleh Agus Akhmadi mengenai moderasi beragama dalam keragaman Indonesia menjadi salah satu penelitian penting untuk melihat bagaimana kehidupan multikultural yang terepresentasi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Maka, perlu pemahaman dan kesadaran multibudaya dalam menghargai perbedaan kemajemukan, dan usaha menebar kebaikan, serta berinteraksi dengan

kelompok luar secara adil. Moderasi beragama diperlukan sebagai upaya membangun sikap moderat, toleran, dan menghargai pendapat orang lain, serta tidak memaksakan kehendak melalui cara kekerasan. Oleh karena itu, semua pihak juga harus terlibat dalam menumbuhkembangkan moderasi beragama dalam lingkup masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian di tengah kehidupan (Akhmadi, 2019). Selain itu, toleransi beragama juga menjadi hal penting untuk terus diupayakan, apalagi di tengah perbedaan antar kelompok agama dan perlu adanya ruang dialog dalam memupuk sikap toleransi yang pada akhirnya saling menghargai dan menghormati antar umat beragama dan masing-masing pemeluk agama juga tidak ada rasa ketakutan atas hak dan kewajiban yang harus direfleksikan dalam kehidupan beragama (Abror, 2020).

Moderasi beragama juga menjadi titik temu dan jalan damai diantara dua kutub ekstrem dalam beragama. Hal ini juga menjadi usaha solusi dalam mendamaikan antar umat beragama. Moderasi beragama juga menjadi keniscayaan bagi terwujudnya kehidupan yang damai dan sejahtera. Konsep tersebut juga menjadi strategi kebudayaan dalam membangun perdamaian di Indonesia. Selain itu, agama juga menjadi salah satu hal penting dalam menjaga martabat manusia. Tidak hanya itu, perkembangan zaman kontemporer juga membuat manusia semakin beragam. Hal itu juga berimplikasi pada keilmuan yang terus dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman dengan berbagai persoalan yang melingkupinya.

Untuk itu, Indonesia sebagai negara yang dinamis dan multi etnis juga rentan konflik dan harusnya mampu menumbuhkembangkan sikap santun, toleran, dan dialog antar umat beragama yang berbeda-beda. Sehingga, target dari upaya penguatan moderasi beragama dapat diwujudkan secara nyata. Kementerian Agama dalam merespon dan menyikapi persoalan ini dengan menegaskan bahwa moderasi beragama adalah target dan visi yang bakal diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Junaedi, 2019). Artinya, moderasi beragama bukan hanya sebuah gagasan semata, tetapi mampu diaplikasikan dalam berbagai program yang nantinya mampu membangun sikap moderat dalam beragama dan menghadapi rentannya konflik, serta adanya ekstremisme dan radikalisme yang masuk kedalam sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat Indonesia yang kultural.

Upaya penguatan moderasi beragama yang dilakukan oleh Kementerian Agama juga menggunakan berbagai strategi dalam mengupayakan kebijakan ini. Melalui akun Instagram Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni @kemenag_ri, didalamnya memuat beberapa ajakan dan kalimat persuasif yang mengajak untuk menebar kedamaian dan mengimplementasikan moderasi beragama di tengah masyarakat yang plural. Misalnya saja, saat peringatan hari santri nasional pada tahun 2018, akun Instagram @kemenag_ri menyebut "Tetaplah tersenyum. Mari #TebarkanKedamaian kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun". Hal itu merepresentasikan ajakan kepada masyarakat untuk saling menebar kedamaian. Upaya ini juga dilakukan untuk mempromosikan moderasi beragama bagi generasi milenial (Arenggoasih & Wijayanti, 2020).

Moderasi beragama di Indonesia juga menjadi jawaban di tengah adanya tindak radikalisme yang mengatasnamakan agama dan membangun sikap moderat dan inklusif (Fahri & Zainuri, 2019). Moderasi beragama juga dapat ditunjukkan dengan sikap tawazun (seimbang), i'tidal (lurus dan tegas), tasamuh (toleran), dan musawah (egaliter), syura (musyawarah), ishlah (reformasi), aulawiyat (mendahulukan yang prioritas), dan mengupayakan tathawwur wa ibkar (dinamis dan inovatif). Artinya, jika implementasi moderasi beragama dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, maka

hidup yang damai dan saling menghargai satu sama lain dapat dirajut. Selain itu, moderasi beragama juga dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan tidak ada lagi diskriminasi dalam keberagaman di negeri ini (Karim et al, 2021).

Moderasi beragama di tengah pandemi Covid-19 juga perlu dilakukan dan suatu keharusan terutama mengenai hubungan antara manusia dengan upaya dalam menghindari dan memutus penularan virus dengan berbagai cara yang telah dilakukan (Syatar, dkk, 2020). Selain itu, pembiasaan diri dalam menerima dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 terutama terkait pembiasaan beribadah umat beragama juga harus diantisipasi.

Tidak hanya itu, isu dan informasi hoax yang ada di media sosial juga menjadi persoalan bagi kehidupan bermasyarakat. Persoalan beragama juga tidak luput dari hal tersebut. Oleh karena itu, implementasi dan aktualisasi moderasi beragama di tengah Covid-19 dilakukan untuk menyikapi dan meng-counter adanya isu-isu yang bertebaran tersebut. Persebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menjadi hal yang harus di atasi. Pasalnya, jika informasi tersebut dikonsumsi secara luas oleh masyarakat, maka hal tersebut akan berdampak pada disinformasi yang mengakibatkan kebingungan dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, di era digital seperti ini, pengarusutamaan informasi yang kredibel dan benar merupakan hal yang sangat penting.

Masyarakat seharusnya harus pintar dalam menerima dan menyaring informasi yang didapatkan. Dalam hal ini, pentingnya moderasi beragama menjadi tameng dan alat dalam meng-counter berbagai informasi tersebut, terutama terkait dengan informasi keagamaan dan virus Covid-19. Sehingga, kondisi demikian membuat masyarakat terfragmentasi ke dalam berbagai kelompok dalam merespon dan menyikapi Covid-19. Bahkan, orang menyebut bahwa virus Covid-19 adalah konspirasi, sehingga tidak perlu percaya akan keberadaannya, termasuk upaya pemerintah melakukan vaksinasi untuk masyarakat, hal itu dinilai hanya sebagai usaha konspirasi dunia atas ini.

Berbagai isu dan informasi yang berkembang di media sosial maupun di masyarakat seharusnya dapat ditangani dengan baik melalui aktualisasi moderasi beragama. Masyarakat Indonesia yang mayoritasnya menganut agama Islam, tentu harus teredukasi dan memiliki kecakapan yang baik dalam menerima dan menyebarkan informasi yang benar dan dipertanggungjawabkan. Jika informasi tersebut tidak benar, tidak perlu dibagikan dan disebarluaskan secara luas. Sehingga, tidak menimbulkan kebingungan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Dengan demikian, informasi yang terpercaya dan benar adanya dapat diterima dengan baik dan memberikan pengetahuan yang presisi. Masyarakat pun mengetahui kebenaran yang memang bersumber dari sumber yang terpercaya, terutama dari otoritas yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4. KESIMPULAN

Moderasi beragama menjadi hal penting dalam melawan arus pemahaman radikal dan ekstremisme. Kementerian Agama menjadi leading sector dalam mempromosikan dan mendorong untuk mengimplementasikan moderasi beragama di berbagai sektor, terutama di lingkup Kementerian Agama dengan melibatkan berbagai elemen pendukung untuk mensukseskan upaya moderasi beragama. Selain itu, dengan pengelolaan dan manajemen yang baik dalam kehidupan keagamaan yang moderat dan toleran di tengah masyarakat yang majemuk. Tentu hal ini akan berdampak pada terbentuknya kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif.

Kementerian Agama telah berperan dan berkontribusi dalam menebar moderasi beragama, terutama bertujuan untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada, yakni munculnya tindak radikalisme, ekstremisme, dan berbagai upaya yang mengarah pada pemahaman agama yang keliru. Maka, upaya meng-counter persoalan tersebut yakni dengan mengusahakan pengimplementasian moderasi beragama secara masif dan merata adalah keniscayaan. Artinya, moderasi beragama tidak hanya sebuah gagasan, tetapi hal praksis dan diaplikasikan dalam lanskap kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam memupuk kedamaian, persatuan dan kesatuan bangsa.

Terakhir, peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama adalah hal mutlak untuk membentengi bangsa dengan membangun sikap moderat dan toleran. Apalagi Indonesia dengan masyarakat yang heterogen dan beragam etnis, ras, budaya, dan agama. Oleh karena itu, kontribusi tersebut harus didukung oleh semua elemen, agar moderasi beragama dan dampaknya dapat dirasakan oleh semua masyarakat, terutama dalam relasi sosial dan keagamaan. Usaha dalam mengokohkan dan penguatan paham keagamaan merupakan upaya penting agar para pemeluk agama mampu melaksanakan aktivitas keagamaannya dengan baik, tanpa ada konflik dan benturan yang akhirnya membuat kerenggangan hubungan antar umat beragama. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi dan sikap moderat harus dijunjung tinggi demi tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, adil, dan sejahtera.

Sementara itu, penelitian ini masih sebatas pada beberapa literatur yang berkaitan dengan implementasi moderasi beragama yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan belum melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber dan informan terkait. Untuk itu, perlu penelitian selanjutnya yang meneliti dan mengkaji terkait kebijakan praksis Kementerian Agama dalam upaya mempromosikan moderasi beragama dengan data-data dan literatur yang mendukung dalam penelitian. Sehingga, didapat hasil penelitian yang komprehensif dan mendalam, serta dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasannya.

5. REFERENSI

- Abror, M. (2020). Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 137-148.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45-55.
- Andrios, B. (2021). *Menag Minta Penguatan Moderasi Beragama Dijalankan, Jangan Dikalahkan*. <https://kemenag.go.id/read/menag-moderasi-beragama-menentukan-wajah-masa-depan-indonesia-6v0aq> Akses pada 27 Juli 2021.
- Arenggoasih, W., & Wijayanti, C. R. (2020). Pesan Kementerian Agama dalam Moderasi melalui Media Sosial Instagram. *Jurnal Jurnalisa: Jurnal Jurusan Journalistik*, 6(1), 160-176.
- Efendi, M.A. (2021). *Ini Langkah-Langkah Kemenag dalam Penguatan Moderasi Beragama*. <https://kemenag.go.id/read/ini-langkah-langkah-kemenag-dalam-penguatan-moderasi-beragama-015ld-015ld-015ld> Akses pada 27 Juli 2021.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 95-100.
- Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 1-22.
- Irama, Y., & Zamzami, M. (2021). Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi

- Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020. *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 11(1), 65–89.
- Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182–186.
- Karim, A., Adeni, A., Fitri, F., Fitri, A. N., Hilmi, M., Fabriar, S. R., & Rachmawati, F. (2021). Pemetaan untuk Strategi Dakwah di Kota Semarang Menggunakan Pendekatan Data Mining (Mapping for Da'wah Strategy in Semarang City Using Data Mining Approach). *Jurnal Dakwah Risalah*, 32(1), 40-55.
- Kementerian Agama. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenag RI.
- Khoeron, M. (Ed.) (2021). *Ini Tiga Kecenderungan Penyebab Pentingnya Moderasi Beragama*. <https://kemenag.go.id/read/ini-tiga-kecenderungan-penyebab-pentingnya-moderasi-beragama-dlyzq-dlyzq> Akses pada 27 Juli 2021.
- Murtado, D. (2021). *Menag: Perlu Ada Strategi Kebudayaan dalam Memperkuat Moderasi Beragama*. <https://kemenag.go.id/read/menag-perlu-ada-strategi-kebudayaan-dalam-memperkuat-moderasi-beragama-gm9lo> Akses pada 27 Juli 2021.
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–348.
- Sya'bani, M. A. Y., Sejati, Y. G., & Fatmawati, A. F. (2020). Integrasi Nilai-nilai Pendidikan Islam Wasatiyyah melalui Budaya Moderasi Beragama sebagai Upaya untuk Meningkatkan Kerukunan dan Toleransi Umat beragama di Kebomas Gresik. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 271–276.
- Syatar, A. S. A., Amiruddin, M. M., & Rahman, A. (2020). Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19): Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, 13(1), 1–13.
- Thobib (2018). *Indonesia Ajak Negara-Negara Islam Bersatu Promosikan Moderasi Agama*. <https://kemenag.go.id/read/indonesia-ajak-negara-negara-islam-bersatu-promosikan-moderasi-beragama> Akses pada 27 Juli 2021.